



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 222 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN  
KEPADA KEPALA UNIT KERJA SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN DAN PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelimpahan kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran kepada Kepala Unit Kerja Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 222 Tahun 2021;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya rotasi pegawai dan evaluasi kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Kerja Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 perlu diubah untuk keempat kalinya;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Kerja Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322.)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11 );
13. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 97);
15. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 30);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Kerja Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 222 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Kerja Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021;
  2. Surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 900/963/DLHK/2021 Hal Usulan Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA UNIT KERJA SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Mengubah untuk keempat kalinya lampiran Keputusan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Kerja Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Segala ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Kerja Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 221 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Kerja Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah menurut ketentuan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 7 Juni 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 222 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA UNIT KERJA SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

9 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	KPA		BPP	Kegiatan/Subkegiatan
	Jabatan	Nama/NIP/Pangkat/Gol.	Nama/NIP/Pangkat/Gol.	
1	SEKRETARIS	Drs. MAMAN WASMAN NIP.19750125 199311 1 003 Pembina Tk. I/IV/b	HANHAN SRI SUHARNO, S.HUT NIP. 196910202006041004 Penata, III/c	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			AI JULAEHA, SE NIP. 196808092007012008 Penata Muda Tk.I, III/b	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			OTANG RUHIYAT, S.Sos NIP. 19730101 2007 01 1 026 Penata Muda Tk.I, III/c	2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			EMPONG WAWANG SUANGSIH NIP. 196703191998032001 Penata Muda Tk.I, III/b	3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya 3.2 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			IIN INDRIYATI NIP. 198011252007012004 Pengatur Tk.I/ II.d	3.3 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
			MIMIN TARMINI, SE NIP. 196905012008012009 Penata Muda Tk.I, III/b	4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			EMPONG WAWANG SUANGSIH NIP. 196703191998032001 Penata Muda Tk.I, III/b	4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			MIMIN TARMINI, SE NIP. 196905012008012009 Penata Muda Tk.I, III/b	4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			EMPONG WAWANG SUANGSIH NIP. 196703191998032001 Penata Muda Tk.I, III/b	4.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			MULYANA, S.Sos NIP. 197303182007011007 Penata Muda, III/a	5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
MULYANA, S.Sos NIP. 197303182007011007 Penata Muda, III/a	6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

No	KPA		BPP	Kegiatan/Subkegiatan
	Jabatan	Nama/NIP/Pangkat/Gol.	Nama/NIP/Pangkat/Gol.	
			NOORDIN, Amd NIP. 197702212008011002 Penata Muda, III/a	7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			EMPONG WAWANG SUANGSIH NIP. 196703191998032001 Penata Muda Tk.I, III/b	7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
			MULYANA, S.Sos NIP. 197303182007011007 Penata Muda, III/a	7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
			MIMIN TARMINI, SE NIP. 196905012008012009 Penata Muda Tk.I, III/b	7.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			IIN INDRIYATI NIP. 198011252007012004 Pengatur Tk.I/ II.d	7.5 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.6 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Hukum	Ir. H BUDI IRAWAN, M.Si NIP. 19651005 199403 1 006 Pembina, IV/a	ENIH ROHAENIH, SE NIP. 196702142007012007 Penata muda, III/a	8 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 8.1 Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/kota 8.2 Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 9 Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 9.1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 9.2 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup 10 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan 10.1 Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 11 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 11.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 11.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
3	Kepala Bidang Pengendalian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	ENCE RASMA, S.Hut, M.Si NIP. 19750820 200003 1 003 Pembina, IV/a	ATI ROSMIATI NINGSIH, S.Sos NIP. 197611152009012001 Penata, III/c	12 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 12.1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
			ATI ROSMIATI NINGSIH, S.Sos NIP. 197611152009012001 Penata, III/c	12.2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
			NENI HENIAWATI, S.SI NIP. 198108242009022004 Penata, III/c	12.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
			ARI KUSDINAR, S.Hut NIP.197903042012121001 Penata muda Tk.I,III/b	13 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga 13.1 Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

No	KPA		BPP	Kegiatan/Subkegiatan
	Jabatan	Nama/NIP/Pangkat/Gol.	Nama/NIP/Pangkat/Gol.	
4	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan	MUCHAMAD TATANG MUCHIDIN, ST,MT NIP. 19640722 199403 1 002 Pembina, IV/a	JAJAT SETIAJAT DJ, SP NIP.19740602 201212 1 001 Penata muda Tk.I,III/b	14 Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 14.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Persampahan
			SUSANTI, S.Hut NIP.198108142010012012 Penata/ III.c	15 Kegiatan Pengelolaan Sampah 15.1 Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
			JAJAT SETIAJAT DJ, SP NIP.19740602 201212 1 001 Penata muda Tk.I,III/b	15.2 Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
			SUSANTI, S.Hut NIP.198108142010012012 Penata/ III.c	15.3 Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
5	Kepala Bidang Pengendalian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	ENCE RASMA, S.Hut, M.Si NIP. 19750820 200003 1 003 Pembina, IV/a	CECEP SUPRIADI, S.Sos NIP.197901062012011001 Penata Muda, III/a	16 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 16.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
			JAJAT SETIAJAT DJ, SP NIP.19740602 201212 1 001 Penata Muda Tk.I/ III.b	16.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			ATI ROSMIATI NINGSIH, S.Sos NIP.19761115 200901 2 001 Penata, III/c	16.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR



No	KPA		BPP	Kegiatan/Subkegiatan
	Jabatan	Nama/NIP/Pangkat/Gol.	Nama/NIP/Pangkat/Gol.	